

## BAB V

### PEMBAHASAN DAN DISKUSI HASIL PENELITIAN

#### **A. Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pilkada Serentak Di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015**

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dipandang sebagai tolak ukur kadar demokrasi lokal suatu Negara. Pilkada secara langsung dipandang sebagai mekanisme rekrutmen politik yang demokratis yang lebih banyak memberikan peluang partisipasi yang lebih besar kepada masyarakat untuk menentukan para pemimpinnya. Mekanisme rekrutmen politik melalui pilkada secara langsung memerlukan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan Kepala Daerah. Sebagai upaya untuk mensosialisasikan serta mengenalkan calon kandidat Kepala Daerah kepada masyarakat secara luas, alat peraga kampanye merupakan suatu alat yang sangat efektif digunakan.

Secara kondisional selain berfungsi memberikan pemahaman tentang keberadaan suatu produk, alat peraga kampanye sekaligus menjadi “mediasi dalam melihat para calon kandidat untuk secara suka rela memberi partisipasi memilih atau mencoblos siapa pemimpin yang cocok jadi pemimpin yang layak bagi masyarakat”. Artinya, melalui alat peraga kampanye yang di sosialisasikan oleh KPUD Sidoarjo memebirikan visi misi dan nama para calon kandidat (termasuk alat peraga kampanye dengan isi pesan politik) diupayakan agar kebutuhan konsumen (pemilih) dapat

dicapai. Sebagaimana Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” KPUD Sidoarjo mengklasifikasikan alat peraga kampanye Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 65 Ayat (1) huruf E menyebutkan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui pemasangan alat peraga. Ketentuan tersebut menjadi fokus peneliti karena alat peraga kampanye dinilai sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat disamping fasilitas kampanye lainnya. Alat peraga kampanye diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni baliho, spanduk dan umbul-umbul.

Pada masyarakat Desa Tambak Oso, juga mengakui bahwa spanduk merupakan salah satu alat peraga kampanye yang tidak di sosialisasikan oleh KPUD Sidoarjo. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket pada jawaban dari item pertanyaan nomor 1, seperti yang terdapat pada gambar diagram dibawah ini:



Mengenai pesan dalam alat peraga kampanye yakni untuk lebih mendekatkan pemahaman mengenai pesan dari para pasangan calon, diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi. Hal ini didasarkan kepada dua alasan. Pertama, definisi tersebut secara tegas menyatakan bahwa kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi, dan alasan kedua adalah bahwa definisi tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktik kampanye yang terjadi dilapangan dan tentang pemahaman masyarakat desa Tambak Oso tentang para calon kandidat isi dalam alat peraga kampanye secara keseluruhan masyarakat menyatakan bahwa mereka cukup dapat memahami siapa saja para calon kandidat yang telah di sosialisasikan oleh KPUD Sidoarjo di pilkada 2015.

Hal ini terlihat dari hasil angket pada item pertanyaan nomor 6 yang menanyakan masyarakat tidak mengenal lebih dalam tentang kandidat pilkada Sidoarjo 2015 karena tidak ada Baliho dalam pilkada, dari 95 orang responden menyatakan sebanyak 42 orang atau responden menyatakan cukup sulit memahami isi visi misi mereka. Karena menurut pandangan mereka, alat peraga kampanye yang di sosialisasikan KPUD Sidoarjo belum sepenuhnya mampu untuk mensosialisasikan ke masyarakat Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten sidoarjo.

Alat peraga kampanye memiliki tujuan yakni informatif-persuasif, alat peraga kampanye menginformasikan kepada pemilih bahwa dengan memilih kandidat atau partai tertentu maka kualitas hidup mereka bisa berubah. Visi-misi serta program kerja yang akan dijanjikan oleh para calon kepala daerah merupakan sebuah referensi

bagi masyarakat Desa Tambak Oso dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih calon Kepala Daerah.

Untuk itu, seharusnya KPUD seharusnya mensosialisasikan lebih maksimal supaya visi-misi, calon kandidat serta nama calon kandidat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Pada masyarakat desa Tambak Oso juga menyatakan tidak menerima informasi tentang adanya pilkada dan masyarakat tidak mengetahui para calon kandidat pilkada Sidoarjo. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket pada pertanyaan nomor 9 dari variabel X yang masyarakat sulit menerima informasi pilkada Sidoarjo 2015 dari spanduk atau baliho yang kurang disosialisasikan oleh KPUD, dari 95 orang responden sebanyak 50 orang setuju menyatakan tidak tahu informasi adanya pilkada .

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 65 Ayat (1) huruf E menyebutkan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui pemasangan alat peraga. Ketentuan tersebut menjadi fokus peneliti karena alat peraga kampanye dinilai sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat disamping fasilitas kampanye lainnya. Alat peraga kampanye diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni terdapat pada :

Pasal 28 Ayat (2) bahwa KPU Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, yakni:

- a. *Baliho/billboard/vedeotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk setiap Kabupaten/Kota;
- b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
- c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 buah setiap pasangan calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan

Dapat disimpulkan bahwa PKPU memberikan batasan dalam berkampanye. Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan esensi kampanye yakni sebagai pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Adapun dengan peraturan tentang pembatasan tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi Partai Politik untuk mensosialisasikan pasangan calonnya terkait PKPU Tahun 2015, dimana tidak seperti peraturan sebelumnya yang membebaskan parpol untuk membuat alat peraga kampanye semampu mereka, namun berbanding terbalik dengan fakta yang ada di Desa Tambak Oso dimana Partai Politik tidak memanfaatkan fasilitas kampanye semaksimal mungkin, sehingga banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

## **B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo Tahun 2015 Di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo**

### **1. Faktor Psikologis**

Kampanye adalah usaha yang dilakukan oleh para kandidat untuk meyakinkan para calon pemilih untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan program-programnya. Melalui kampanye, para kandidat menawarkan program-programnya dengan harapan calon pemilih merasa yakin dan memberikan mandatnya. Bagi publik atau calon pemilih, kampanye merupakan sarana untuk melihat, mengamati, menentukan calon mana yang akan dipilihnya. Demikian juga kampanye bukan hanya sekedar kebutuhan para calon kepala daerah atau wakil kepala daerah tetapi juga kebutuhan pemilih untuk menentukan pilihannya bahkan menentukan akan menggunakan hak pilihnya atau tidak.

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kampanye tidak begitu besar, hasil temuan di lapangan bervariasi sebagian menunjukkan sebagian responden yang pernah melihat dan terlibat dalam kampanye dan sebagian dari responden tidak pernah mengikuti ataupun terlibat dalam kampanye.

Hal ini berarti keikutsertaan seseorang dalam berkampanye tidak menjadi penentu bahwa orang tersebut akan ikut dalam pemilihan,

kebanyakan masyarakat yang ikut dan terlibat kampanye hanya sebagai massa yang menikmati suguhan hiburan yang disediakan/ diberikan parpol atau calon yang sedang berkampanye. Setiap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan selalu berusaha mendekati diri kepada masyarakat untuk mengambil simpati dari masyarakat dengan harapan masyarakat tersebut akan memilihnya pada saat pemilihan berlangsung. Setiap calon akan berusaha mendekati dirinya kepada masyarakat melalui kampanye-kampanye secara langsung ke lapangan, akan tetapi KPUD tidak mensosialisasikan kampanye melalui melalui spanduk-spanduk.

Mereka juga tidak jarang memberikan sumbangan-sumbangan pada korban bencana yang ada di daerahnya pada saat pemilihan sudah dekat, hal ini dilakukan untuk menarik simpati dari masyarakat dengan harapan masyarakat akan memilihnya pada saat pemilihan sudah tiba. Pada hasil temuan di angket menunjukkan mayoritas responden masyarakat menilai para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak sudah melakukan rangsangan yang baik dengan masyarakat namun masyarakat atau informan sudah paham bahwa itu adalah salah satu strategi mereka untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan mendapat hati masyarakat melalui pendekatan tersebut bagi sebagian masyarakat pasti akan kagum dengan cara mamilih calon tersebut tapi bagi sebagian lagi hal itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap pilihannya kelak .Seperti yang ada di pertanyaan angket



semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Hal tersebut dikemukakan oleh masyarakat Desa Tambak Oso.

Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan penjelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan politik atau adanya perasaan bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi menunjukkan pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa mungkin tidak mampu mempengaruhi peristiwa dan kebijaksanaan politik. bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih, tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik sering kali berada diluar kontrol pemilih.

Sebab, para pemilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh diluar jangkauan pemilih. Perasaan inilah yang disebut dengan anomie. Sedangkan alienasi berada diluar apatis dan anomie. Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh-pengaruh terhadap kehidupan seseorang.

## 2. Faktor sistem politik

Kepada penyelenggara pemilu, keberadaan masyarakat yang golput dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dapat dikatakan cukup besar, perlu dilakukan sosialisasi alat peraga kampanye bidang kepada masyarakat, bertujuan untuk pemahaman masyarakat atau mengetahui akan adanya pilkada dan untuk selalu tetap menyadari akan pentingnya keikutsertaan atau berpartisipasi dalam pemungutan suara. Akan tetapi masyarakat Desa Tambak Oso tidak memilih atau golput di karenakan kurangnya sosialisai dari KPUD Sidoarjo. Dampak dari itu para masyarakat lebih memilih golput dapat di lihat dari pertanyaan di angket nomor 4 variabel Y tentang Masyarakat tidak menerima informasi mengenai pilkada Sidoarjo Tahun 2015 dari KPUD 46 responden lebih memilih setuju artinya banyak yang golput selanjutnya dengan hasil pertayaan angket nomor 4 dapat di lihat pada diagram di bawah ini :



Daerah atau Wakil Kepala Daerah benar-benar mempengaruhi masyarakat untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan .

Hal ini dilakukan untuk menarik simpati dari masyarakat dengan harapan masyarakat akan memilihnya pada saat pemilihan sudah tiba. Pada hasil temuan di angket menunjukkan mayoritas responden masyarakat menilai para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat namun masyarakat atau informan sudah paham bahwa itu adalah salah satu strategi mereka untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan mendapat hati masyarakat melalui pendekatan tersebut . Bagi sebagian masyarakat pasti akan kagum dengan cara mamilih calon tersebut tapi bagi sebagian lagi hal itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap pilihannya kelak. Seperti yang ada di pertanyaan angket nomor 6 variabel Y tentang masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mengenal para kandidat dan 65 responden lebih memlih setuju bisa di lihat pada gambar diagram di bawah ini :

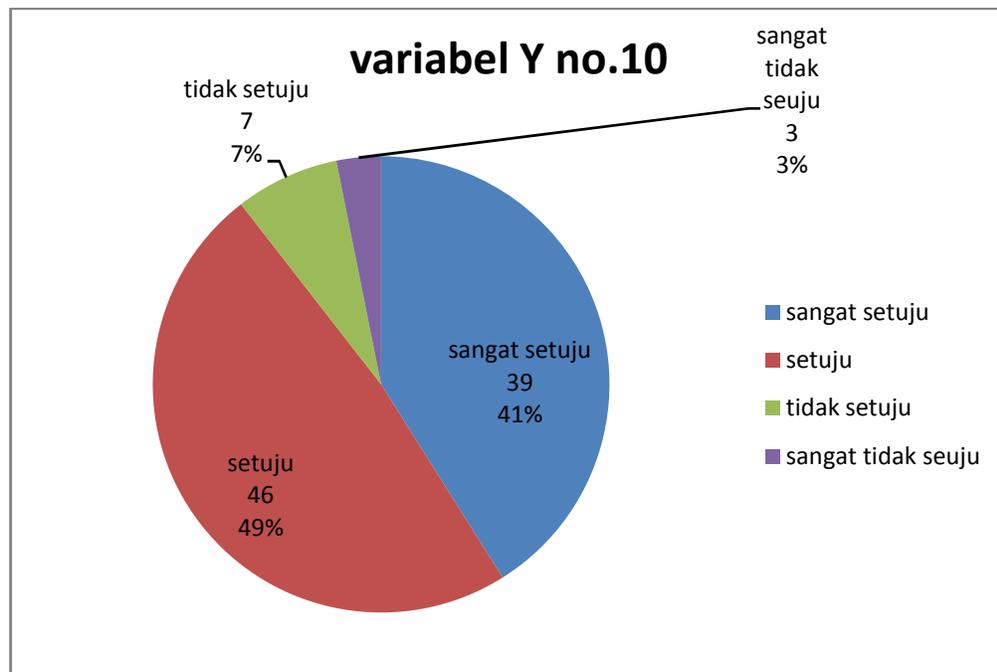


tentang kehadiran bahwa warga negara yang status social dan ekonomi lebih berpartisipasi politik... ). Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia baik pendidikan formal maupun informal. Dari data yang didapat dapat dilihat bahwa secara umum Informan yang diambil adalah masyarakat di Kecamatan Tamalanrea yang sudah berpendidikan cukup tinggi.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa faktor pendidikan juga mempengaruhi masyarakat di desa tambak Oso untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan. Sebab, masyarakat di desa tambak oso yang tingkat pendidikannya cukup tinggi tidak ikut memilih (golput) dalam pemilihan bukan karena ketidakpedulian mereka terhadap pemilu atau terhadap masalah politik dikarenakan Masyarakat percaya akan janji-janji para kandidat pilkada Sidoarjo 2015 dari pertanyaan angket no.5 pada variable Y dan bisa di lihat pada gambar diagram di bawah ini:



Gambar 5.8



Faktor sosial ekonomi merupakan faktor krusial sehingga masyarakat mayoritas golput, tingkat pendidikan dan ekonomi rendah masyarakat terkadang menimbulkan dilematis bagi diri pemilih namun sekali lagi urusan financial mampu mengaburkan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pilkada serentak di Sidoarjo tahun 2015 di Desa Tambak Oso karena asumsi yang terbangun pada diri masyarakat adalah lebih mementingkan apa yang nampak dan menghasilkan sesuatu yang pasti dan menguntungkan daripada menggantungkan harapan yang tidak pasti.

Fenomena tersebut senada dengan yang dikemukakan sebelumnya oleh Raymond .E.Wolfinger dan Steven J.Rossenstone bahwa tingkat

pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan, disekolah dan perkuliahan, kita belajar mengenai system politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita, dan diterangkan untuk menekan teman sebayanya untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan suatu peroleh dari rasa keberhasilan , dari mengambil alih takdir kita.

Segala pengaruh ini mempengaruhi kita untuk memberikan suara yang kurang berpendidikan dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses politik, ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan mereka, dan kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan pada aspek-aspek birokratik dari memilih dan mendaftar. Sementara itu pekerjaan pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu disbanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sector-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah . Masyarakat sudah lelah dengan janji-janji kampanye yang tidak pernah ditepati. pilkada kini mulai dipertanyakan oleh masyarakat, tidak ada keuntungan signifikan yang diperoleh masyarakat dalam keikutsertaan mereka

dalam pemilihan. Dengan persepsi inilah yang menjadikan masyarakat lebih mementingkan urusan lain seperti yang lebih menguntungkan daripada menghadiri acara pemilihan.

Dari data yang didapat diketahui bahwa seluruh responden tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa tambak oso kurang berpartisipasi dalam Pilkada Tahun 2015 yang lalu . Mayoritas responden beralasan tidak menggunakan hak pilih pada pilkada karena asumsi yang terbangun pada diri masyarakat yaitu lebih mementingkan kepentingan ekonomi serta mereka menganggap bahwa pemilu tidak akan membawa perubahan yang signifikan asumsi tersebut terbangun karena didukung oleh faktor tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

### **C. Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Kampanye Terhadap Pilihan Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo Tahun 2015 Di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo**

Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud dari adanya demokrasi lokal. Dalam sebuah sistem demokrasi, partisipasi politik merupakan sebuah identitas yang tidak dapat dipisahkan dari sistem tersebut. Dalam pilkada, rakyat merupakan pemilik dari otoritas tertinggi yang secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon pemimpinnya secara langsung dan merekalah yang akan menentukan

siapa yang berhak menjadi pemimpin. Sebagaimana asas demokrasi yang menjunjung tinggi suara mayoritas.

Dalam menentukan pilihan politik, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya dalam pilkada. Diantaranya adalah mengenai informasi, peristiwa dan isu-isu yang diterima pemilih baik dari media massa maupun dari orang-orang terdekat. Visi-misi serta program kerja juga merupakan faktor yang tak dapat dipisahkan dalam menentukan pilihan dalam pilkada.

Konsep perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung, tetapi ada sebuah pandangan lain yang bersebrangan dan bertolak belakang dengan konsep perilaku pemilih. Konsep tersebut adalah perilaku tidak memilih atau yang dikenal dengan sebutan golongan putih (golput). Golput sesungguhnya merupakan fenomena politik dalam sebuah Negara demokrasi. Pelaku golput memiliki tujuan mendelegitimasi pemilu yang diselenggarakan pemerintah. Sisi lain yang membuktikannya adalah pemerintah yang telah memberikan ruang aspirasi bagi kepentingan kelompok ekstraparlementer. Kenyataan itu menyebabkan golput sering disebut juga sebagai barometer kualitas demokrasi.

Perilaku tidak memilih atau lebih dikenal dengan golput merupakan bentuk pilihan yang terbentuk dari pribadi masing-masing yang terbentuk sendiri maupun yang terbentuk dari pengaruh lingkungan lain berdasarkan penjelasan dan pendapat mengenai golput dapat diartikan sebagai suatu gerakan sekelompok orang atau

masyarakat atau individu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sekelompok orang atau individu tersebut alasan yang sengaja atau tidak memilih serta memiliki tujuan yang jelas mengenai hal yang dilakukan tersebut dan juga dengan dampak dan akibat yang akan terjadi nantinya. Golput juga sebagai wujud protes politik dikarenakan adanya perasaan yang tidak puas dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan sistem dan objek politik yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian sosialisasi dengan menggunakan alat peraga kampanye tentang profil, visi-misi serta program kerja calon kepala daerah mutlak diperlukan. Karena kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon dalam alat peraga kampanye dapat membantu masyarakat sebagai pemilih untuk lebih mengenal calon kepala daerah yang nantinya akan mereka pilih.

Pada pilkada Sidoarjo tahun 2015 misalnya, masyarakat desa Tambak Oso di kecamatan Waru mereka tidak lebih memilih golput dari pada memilih salah satu dari calon dikarenakan tidak ada alat peraga kampanye. Hal ini dapat juga dilihat dari hasil angket variabel Y pada prosentase jawaban item pertanyaan nomor 7, seperti yang tersaji dalam diagram dibawah ini:







“Batasan perilaku *Non voting* tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak memilih karena faktor kelalayan atau situasi-situasi yang tidak bias di kontrol oleh pemilih, seperti karna sakit atau kondisi cuaca termasuk sedang berada di suatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil atau ditengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih. Dalam konteks semacam ini, *Non voting* adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilih pada saat hari H pemilu karna faktor tidak adanya motivasi.”

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan SPSS versi 16.0 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak terlalu besar antara Kebijakan Pengaruh Kampanye Terhadap Data Pemilihan Golput, artinya 5,1 % data pemilihan golput dipengaruhi oleh *Kebijakan Pengaruh Kampanye*, sisanya sebesar 94,9 % dipengaruhi oleh faktor lain.